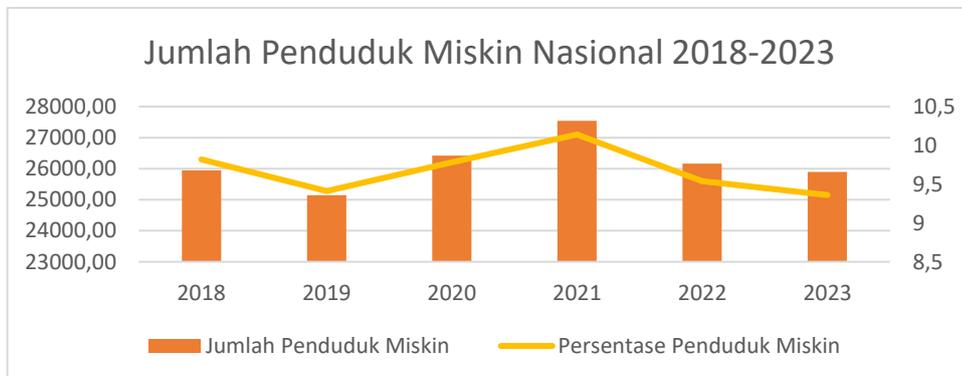


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan utama dari Pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara. Idealnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka angka kemiskinan juga ikut menurun. Ditingkat nasional, jumlah penduduk miskin selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami Trend menurun signifikan hingga 1,6 juta jiwa. Angka tersebut memberikan sinyal bahwa proses pembangunan yang dilakukan selama ini cukup efektif dan berhasil. Keberhasilan ini disebabkan menurunnya angka pengangguran terbuka, naiknya nilai tukar petani, laju inflasi menurun dan naiknya konsumsi rumah tangga. Menurunnya angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Nasional
Sumber: katadata.com, 2023

Gambar 1.1, menjelaskan Trend kemiskinan yang menurun ditingkat Nasional selama periode pengamatan. Namun, Tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur justru tinggi hingga mencapai 4.236,51 Juta Jiwa dengan sebaran terbesar berada dipedesaan. Kemiskinan dipedesaan menarik untuk dicatat, bahwa sebagian besar belanja pemerintah diarahkan ke daerah perkotaan.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah, khususnya bagi perempuan di daerah pedesaan, dan meskipun terdapat berbagai kebijakan, elemen modal sosial seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan perlu ditingkatkan (Idrus & Rosida, 2020). Kurangnya perhatian pemerintah ke masyarakat pedesaan membuat kesejahteraan masyarakat desa rendah khususnya angka kemiskinan dan Kesehatan.

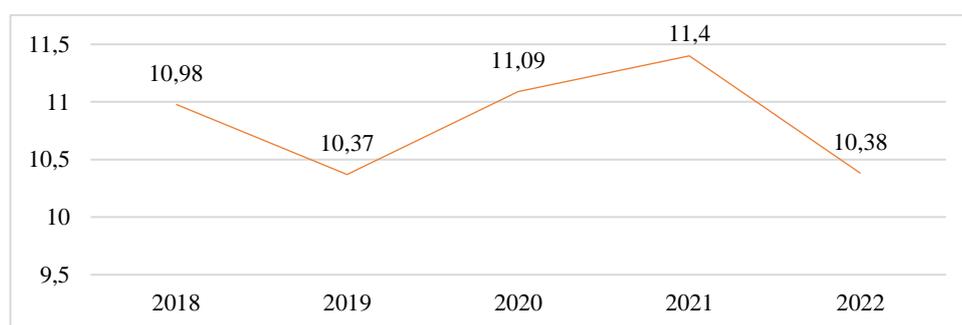
Kelompok masyarakat miskin ini akan menciptakan permasalahan kemiskinan kultural dan struktural yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara serius, terutama bagi generasi mendatang. Secara umum yang tergolong miskin adalah “kelompok sisa”, yaitu kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak dari berbagai kebijakan tertentu pemerintah pusat, seperti IDT, namun secara umum terdampak oleh PKT, Program Bimbingan Masyarakat, Program Peningkatan Pendapatan. untuk Petani dan Nelayan, NKKBS, KUD, PKK Desa, dll. Kelompok ini dinilai sulit dijangkau karena kualitas sumber daya yang rendah dan tidak memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor produksi. Sedangkan sebaran penduduk miskin antar provinsi dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Sumber: BPS, 2022

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan kriteria untuk mengidentifikasi penduduk miskin harus memenuhi paling sedikit 6 (enam kriteria). Kriterianya adalah sebagai berikut: 1) perumahan; 2) fasilitas terhadap air minum dan sanitasi; 3) Pendapatan/Beban pengeluaran; 4) Jumlah harta yang dimiliki 5) intensitas makan (lebih dari dua kali sehari) dan kualitas gizi pangan; 7) bisa membeli satu set pakaian baru dalam setahun. Sedangkan faktor yang menyebabkan kemiskinan disuatu daerah disebabkan oleh infrastruktur pelayanan dasar, tingkat Pendidikan, status Kesehatan, jumlah upah yang diterima dan lain sebagainya (Syahrani, 2021).

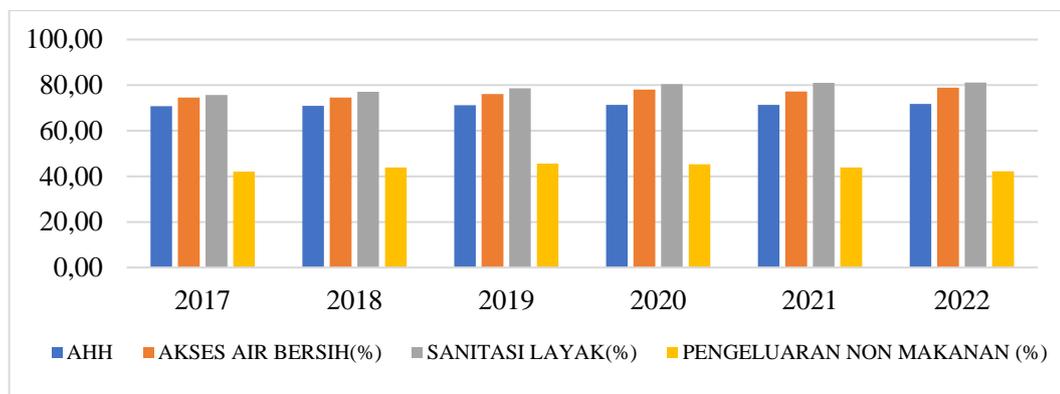
Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ditingkat nasional dengan jumlah sebesar 4.181.290 juta jiwa. Kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat (Karisma & Soejoto, 2010). Pertumbuhan ekonomi begitu penting untuk suatu daerah, manfaat yang diberikan dari semakin tingginya pertumbuhan ekonomi salah satunya ialah menurunnya Tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dijelaskan pada gambar 1.3.



Gambar 1. 2. Pertumbuhan Penduduk Miskin di Jawa Timur
Sumber; BPS, 2022

Pertumbuhan Masyarakat miskin di Jawa Timur cenderung fluktuatif selama periode pengamatan. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu dari beberapa solusi untuk menurunkan kemiskinan, cara lain yang mampu menurunkan Tingkat

kemiskinan di masyarakat yaitu: lewat kesehatan masyarakat dan konsumsi pada masyarakat. Kesehatan menjadi investasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri, kesehatan menjadi salah satu faktor krusial dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan yang rendah akan lebih sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena diperkirakan jika masyarakatnya sehat maka produktivitas akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi (Dio Prananda, Idris, 2018) & (Safitri & Noviarita, 2022).



Gambar 1. 3. Angka Harapan Hidup, Akses Air Bersih, Akses Sanitasi Layak dan Pengeluaran Non Pangan
Sumber: BPS, 2022

Dalam bukunya yang berjudul “The End of Poverty,” Sachs (2005) menjelaskan salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Maka dari ini kesehatan menjadi salah satu agenda baik secara Global maupun nasional yang termuat dalam 17 program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keinginannya dalam menjamin kehidupan yang sehat, layak serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat membuat masyarakat rentan terkena penyakit bahkan dapat menyebabkan kematian.

Variabel lain, air merupakan sumber daya alam utama yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk hidup. Kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan manusia, terutama di negara-negara berkembang, dapat ditingkatkan melalui akses terhadap air bersih dan sanitasi (Munandar et al., 2019). Akses yang tidak memadai terhadap air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) merupakan faktor risiko yang terus meningkat terhadap kesehatan orang tua baru dan anak-anak mereka. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 1,9 miliar orang di seluruh dunia tidak akan memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar dan 1,2 miliar orang tidak akan memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2021 (WHO & UNICEF, 2021). Selain itu, kurangnya akses terhadap air minum bersih juga menjadi penyebab kemiskinan (Nania Tamana, 2018).

Di Indonesia sebagai negara yang berpendapatan menengah, akses air bersih masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat, berdasarkan hasil laporan Riskesdas (2018) Hanya sekitar 46,5% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang baik, dimana 50,5% berada di perkotaan dan 41,2% di pedesaan (Balitbangkes RI, 2018). Peningkatan pasokan air, sanitasi, dan kebersihan secara bersamaan efektif dalam mencapai kesehatan yang lebih baik bagi orang miskin di negara berkembang serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dalam pengadaan air bersih harus menjadi prioritas pemerintah baik nasional maupun tingkat desa agar Masyarakat yang belum bisa mengakses layanan air bersih mampu terbebas dari segala penyakit dan produktivitasnya meningkat.

BPS Jatim (2020), jumlah presentasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 80,48% dengan tren yang terus meningkat menunjukkan hal

positif bagi Kesehatan Masyarakat. Mengurangi kontaminasi feces di pemukiman informal perkotaan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, tetapi memerlukan penanganan berbagai faktor dan interaksi manusia dengan lingkungan (French et al., 2021). Air bersih serta sanitasi yang layak begitu penting dalam mendukung kesehatan manusia. Namun, karena buruknya perekonomian serta buruknya infrastruktur, kekurangan air dan sanitasi yang buruk, jutaan orang meregang nyawa setiap tahun karena berbagai macam penyakit akibat air yang tercemar dan sanitasi yang buruk (Elysia, 2015).

Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas konsumsi akan selalu dikaitkan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar atau tingkat kebahagiaannya. Semakin tinggi pengeluaran konsumen terhadap barang dan jasa maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan keluarga. Seiring berjalannya waktu, perilaku konsumen masyarakat mengalami perubahan. Pergeseran kebiasaan konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dilihat sebagai salah satu tanda meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Misalkan ketika kebutuhan pangan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk keperluan non-makanan (Abdillah et al., 2019).

Proporsi pengeluaran masyarakat non-makanan menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Belanja penduduk kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah di Jawa Barat seharusnya lebih tinggi pada belanja non-gizi seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi dibandingkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi

(Nina & Rustariyuni, 2020). Pengeluaran non pangan dapat menunjukkan bahwa suatu individu atau keluarga dalam kesejahteraannya meningkat.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah dan perbedaan dari riset lainnya. Maka, penelitian ini membahas dari sudut pandang yang berbeda melalui penggunaan variabel kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung dalam kehidupan Masyarakat. Disamping itu, penelitian ini bermaksud dapat menambah khasanah baru dalam analisis dinamika kemiskinan yang berlangsung hingga saat ini. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti menentukan tema dalam penelitian ini “Pengaruh Akses Air Bersih Dan Sanitasi Layak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah angka harapan hidup, Akses Air Bersih, Sanitasi Layak, serta Pengeluaran Non Makanan berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali dan menguji apakah Angka Harapan Hidup, Akses Air Bersih, Sanitasi Layak, serta Pengeluaran Non Makanan mempengaruhi kualitas hidup penduduk di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, diantaranya:

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu Khasanah baru dari pengaruh angka harapan hidup, akses air bersih, sanitasi layak, serta pengeluaran non pangan dalam Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Tolak Ukur Akses Udara Bersih dan Sanitasi yang Baik terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

3. Bagi Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi seluruh civitas akademika khususnya yang ingin melakukan penelitian terkait akses air bersih dan sanitasi layak.